

PERSEPSI DAN PREFERENSI AKADEMISI DALAM FASILITASI PENDIDIKAN 4.0 DI PERGURUAN TINGGI: KEBIJAKAN KAMPUS MERDEKA DI PROGRAM STUDI PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA

D.A.K. Sari, Taufiqur Rachman
Universitas Esa Unggul, Jakarta
Jalan Arjuna Utara Tol Tomang Kebun Jeruk Jakarta 11510
dayu@esaunggul.ac.id

Abstract

The fundamental approach in higher education had to respond to the current transition in the labor market and occupation choice characteristics. The gap between a company's needs and university output was not merely matched. So that, the university needed to involve its academic staff, industry/ company, and government to develop a flexible curriculum. This study aimed to explain the perception and preference of academics by providing education 4.0 in higher education through the implementation of Freedom Education (Kampus Merdeka). The descriptive quantitative analysis was deployed to represent the data. The study concluded that 90% of the academics/lecturers were willing to contribute to the Kampus Merdeka program delivery, varied in kind of activities preferences. However, this program still required further development in the regulatory aspects.

Keywords: *Education 4.0, Freedom Education, University, Academic*

Abstrak

Pendekatan yang mendasar di perguruan tinggi harus merespon transisi yang terjadi saat ini di pasar tenaga kerja dan juga karakteristik pilihan pekerjaan. Kondisi saat ini, terdapat ketidaksesuaian antara kebutuhan industry dengan lulusan perguruan tinggi, sehingga, university perlu melibatkan setiap sumber daya manusia di perguruan tinggi, industry dan pemerintah untuk mengembangkan kurikulum yang fleksibel. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan persepsi dan preferensi akademisi dalam upaya untuk menyediakan pendidikan 4.0 melalui penyelenggaraan Kampus Merdeka di program studi Perencanaan Wilayah dan Kota. Data dianalisis dengan metode deskriptif kuantitatif untuk menampilkan data. Kesimpulan dari penelitian ini yaitu 90% dosen/akademisi bersedia untuk turut serta dalam penyelenggaraan program Merdeka Belajar Kampus Merdeka, dengan preferensi bentuk kegiatan yang bervariasi. Namun demikian, program ini masih memerlukan penguatan dalam hal regulasi program.

Kata kunci : Pendidikan 4.0, Kampus Merdeka, Universitas, Akademisi

Pendahuluan

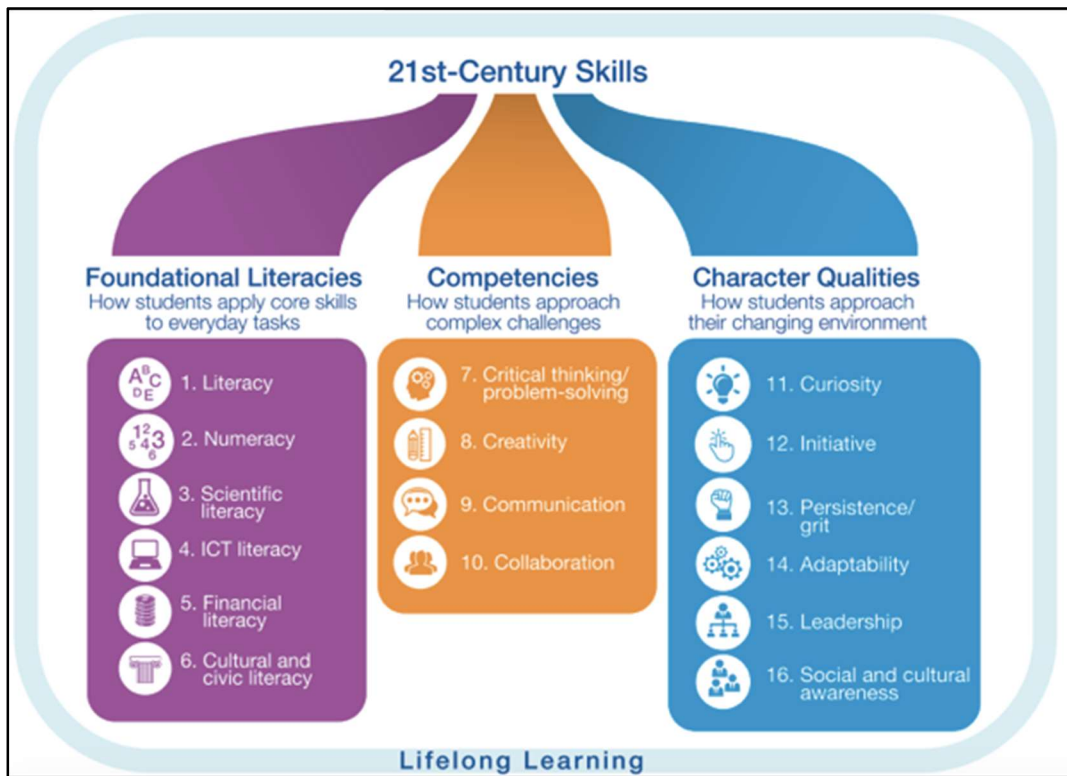
Dinamika yang terjadi dalam berbagai aspek kehidupan, membutuhkan suatu pendekatan baru yang lebih efektif dan efisien. Pada aspek pendidikan modern, menyediakan pendidikan yang dapat memberikan jembatan penghubung antara dunia kerja dan pendidikan merupakan suatu keharusan. Dalam hal ini, perlunya kemampuan baru, mampu berpikir kreatif dan inovatif menjadi kompetensi yang harus dimiliki oleh para lulusan perguruan tinggi. Pengembangan pendidikan dapat

berlangsung baik jika terdapat kurikulum yang dapat menyediakan struktur yang multi-disiplin dan berkolaborasi dengan pemangku kepentingan lainnya, termasuk dunia industri, pemerintah serta seluruh sivitas akademika dalam perguruan tinggi agar diperoleh suatu strategi yang inovatif untuk peningkatan kualitas (Vodenko, Ivanchenko, Tereshchenko, Petrova, & Mishchenko, 2019). Pendekatan ini selaras dengan paradigma pendidikan 4.0 yang berorientasi keterampilan masa depan dan

mengarusutamakan kemitraan antar pemangku kepentingan.

Secara umum, dalam merumuskan kurikulum untuk peningkatan pendidikan perlu mengakomodasi berbagai kemampuan yang lebih dibutuhkan pada abad 21 agar terwujud hubungan yang setara antara dimensi pendidikan dan industri. Selain kemampuan literasi dasar (data, *science-tech.* dan manusia), mahasiswa perlu penguasaan keterampilan, yang menumbuhkan *HOTS-High Order Thinking Skill* (World

Economic Forum, 2015), antara lain *communication, collaboration, critical thinking, creative thinking, computational logic, compassion and civic responsibility.* Selain itu, pembentukan karakter berkualitas agar dapat bersaing pada era industri 4.0 dan *society 5.0*, juga perlu ditumbuhkan. Untuk mendukung hal tersebut, kurikulum yang komprehensif yang menghubungkan antara pengetahuan keilmuan perlu berjalan beriringan dengan kemampuan yang dibutuhkan pada abad 21.



Gambar 1
21st Century Skills (World Economic Forum, 2015)

Sebagai respon terhadap perkembangan kehidupan dunia, institusi pendidikan di Indonesia dalam hal ini Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi telah menerbitkan kebijakan Standar Nasional Pendidik Tinggi (SN Dikti) pada Permendikbud No. 3 tahun 2020. Dalam kebijakan tersebut,

setiap perguruan tinggi perlu menyediakan kurikulum yang mampu meningkatkan pengalaman mahasiswa dalam setiap proses pembelajaran. Bentuk dari peningkatan pengalaman mahasiswa, melalui kebijakan ini mahasiswa diberikan kesempatan belajar di luar program studi, paling lama 3 (tiga) semester. Kebijakan

ini yang dikenal dengan Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM).

Pendidikan menjaga dan meningkatkan masyarakat dengan mengelola pengalaman pembelajar dengan baik (Ornstein & Hunkins, 2018). Para pendidik memiliki kewajiban untuk membuat suatu lingkungan pembelajaran yang dapat memberikan aspek pengalaman kepada peserta didik. Program studi Perencanaan Wilayah dan Kota melalui penyelenggaraan program MBKM yang diselenggarakan secara mandiri baik berpartisipasi dalam program *flagship* Kemendikbudristek bertujuan untuk memberikan pengalaman yang lebih besar bagi mahasiswa. Dalam penyelenggaraan kebijakan ini, program studi melakukan berbagai penyesuaian, diantaranya evaluasi kurikulum, pedoman akademik dan penyediaan panduan atau pedoman pelaksanaan setiap kegiatan MBKM untuk sivitas akademika di lingkungan program studi. Proses perumusan kebijakan yang mendukung MBKM dilakukan bersama-sama antara sumber daya manusia di program studi bersama pemangku kepentingan atau mitra program studi.

Tujuan

Studi ini bertujuan untuk menggambarkan persepsi dan partisipasi akademisi (dosen) dalam penyelenggaraan implementasi program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) pada program studi perencanaan wilayah dan kota, Universitas Esa Unggul.

Metode Penelitian

Dosen aktif di program studi PWK menjadi responden pada studi ini, karena sesuai dengan tujuan dari penelitian ini untuk melihat persepsi dosen terhadap penyediaan fasilitas kebijakan MBKM, khususnya di prodi PWK. Kuesioner terstruktur telah tersedia dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi.

Tautan <https://survey.spadadikti.id/> untuk objek dosen dikirimkan melalui media sosial pesan, whatsapp. Form survei tersebut didistribusikan ke dosen, dengan metode *snowball sampling* sampai dengan data yang terkumpul telah memenuhi. Tautan survey ditutup setelah 7 (tujuh) hari disebar.

Data dikumpulkan berdasarkan karakteristik demografi yang telah terdaftar dalam basis data PDDIKTI melalui Nomor Induk Dosen Nasional (NIDN) dan dilanjutkan dengan pernyataan terkait persepsi terhadap pelaksanaan program MBKM secara umum dan di program studi. Pernyataan yang terdapat dalam kuesioner tersebut, telah disusun sesuai dengan pertimbangan akademik untuk menghindari bias pemahaman. Pilihan jawaban dalam setiap pernyataan, diukur untuk mengetahui tingkat pengetahuan dan partisipasi dosen dalam program MBKM. Melalui distribusi frekuensi akan menampilkan kesimpulan dari tiap data (pertanyaan).

Hasil dan Pembahasan

Berdasarkan hasil kuesioner tersebut, dapat dikategorikan menjadi 4 (empat) dimensi terkait fasilitasi pendidikan tinggi 4.0, melalui implementasi Kampus Merdeka di Program studi PWK. Empat kategori tersebut yaitu terkait 1) Kebijakan penyelenggaraan dan kegiatan Merdeka Belajar Kampus Merdeka di program studi, 2) Informasi program MBKM, 3) Kontribusi dosen (akademisi) dalam penyelenggaraan program dan 4) Dampak program MBKM bagi perguruan tinggi.

Demografi dari Responden

Responden yang mengisi survei ini yaitu para dosen program studi yang telah terdaftar pada basis data PDDIKTI, diperoleh sejumlah 10 (sepuluh) dosen dari jumlah total dosen prodi yaitu 12 orang. Sehingga, diketahui jika 90% dosen program studi telah berpartisipasi dalam

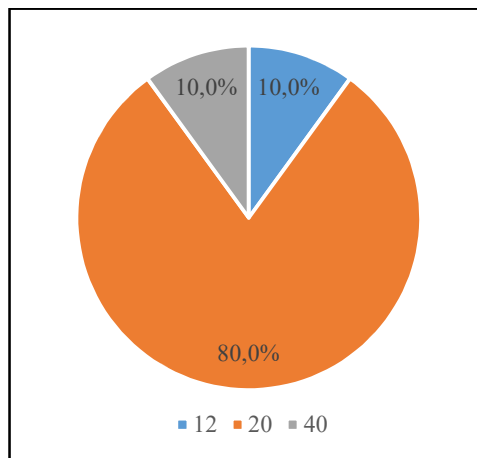
survei ini. Dosen yang sebagai response dalam penelitian ini, memiliki lama kerja antara 5-10 tahun. Demografi dari responden tersebut dapat dilihat pada tabel berikut, sesuai dengan lama kerja.

Kebijakan Penyelenggaraan dan Kegiatan MBKM

Filosofi mengenai tujuan pendidikan, bahan pembelajaran yang sesuai, proses belajar mengajar serta menentukan kegiatan pendukung, perlu ditekankan dan dikembangkan dalam program studi (Ornstein & Hunkins, 2018). Perumusan kurikulum dan perangkat kebijakan yang mendukung terselenggaranya kurikulum dibuat oleh seluruh pihak yang berkepentingan pada program studi. Untuk mengakomodasi perkembangan dunia, prodi PWK UEU merumuskan kurikulum yang dapat memberikan kesempatan bagi mahasiswa dan lulusannya agar dapat berkontribusi secara luas di bidang PWK ataupun bidang lain yang terkait. Evaluasi terhadap kurikulum Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota (PWK) di UEU, sebagai adaptasi terhadap kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) dan mengembangkan kurikulum dengan perubahan arah perkembangan dunia saat ini. Integrasi program MBKM dalam kurikulum tetap bertujuan untuk mencapai Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) yang sudah dimiliki oleh program studi, dengan bentuk pembelajaran mahasiswa di luar prodi, selama maksimal 3 semester (Junaidi, 2020).

Menurut Buku Panduan Merdeka Belajar Kampus Merdeka (2020), besaran kredit yang dapat disetarakan dengan BKP MBKM yaitu 20-40 sks, bergantung pada lama waktu yang dihabiskan untuk setiap kegiatan. Sehingga, setiap perguruan tinggi dapat menyesuaikan dengan karakteristik kegiatan. Para dosen memahami jika kegiatan MBKM dapat dikonversi menjadi 20 sks. Namun, karena masih adanya perkembangan kebijakan,

menyebabkan adanya bermacam-macam pemahaman terkait besaran penyetaraan sks ini, seperti pada Gambar 2 berikut ini.

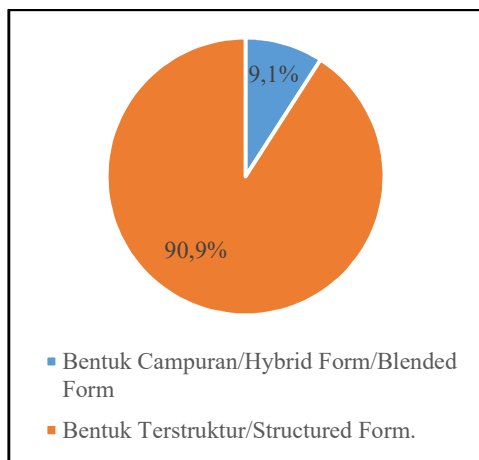


Gambar 2. Grafik Persepsi Dosen Terhadap Jumlah Kredit yang Diperoleh untuk Setiap BKP MBKM

Rekognisi jumlah sks BKP MBKM di Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota untuk bentuk pembelajaran di lembaga Non Perguruan Tinggi telah ditetapkan yaitu pada rentang 14-20 sks untuk tiap kegiatan MBKM, dan maksimal 40 sks jika mahasiswa mengikuti kegiatan pembelajaran selama 3 semester (paling lama). Sedangkan, untuk BKP Pertukaran Pelajar perhitungan sks disesuaikan dengan berapa besar bobot sks dari mata kuliah yang diambil di perguruan tinggi penerima, yang sudah dipetakan kesesuaiannya dengan CPL program studi.

Implementasi program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) dirancang dan diakomodasi dalam CPL dan mata kuliah program studi Perencanaan Wilayah dan Kota, beserta kesepakatan dengan mitra kerjasama. Pengakuan kredit kegiatan MBKM pada Prodi PWK dilakukan dengan bentuk terstruktur (*structured form*) ataupun campuran (*blended form*). Untuk format terstruktur, dimana setiap BKP (Bentuk Kegiatan Pembelajaran) MBKM akan disetarakan atau distrukturkan sesuai

dengan kurikulum yang ditempuh oleh mahasiswa (Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan; Mohammad Tohir, 2020.). SKS tersebut dinyatakan dalam bentuk kesetaraan dengan mata kuliah yang ditawarkan yang kompetensinya sejalan dengan kegiatan MBKM yang ditempuh mahasiswa. Sedangkan, bentuk campuran (*blended form*) merupakan gabungan dari bentuk bebas dan terstruktur. Dalam hal ini, prodi akan merekognisi jam kegiatan mahasiswa dalam jumlah sks, berdasarkan *kompetensi* yang didapatkan oleh mahasiswa selama kegiatan MBKM (*soft skill dan hard skill*) serta melakukan penyetaraan dengan mata kuliah yang sudah tersedia di program studi. Namun pada awal implementasi, program studi masih menggunakan bentuk terstruktur untuk merekognisi kegiatan magang MBKM mahasiswa, sehingga persepsi dari para dosen masih menggambarkan seperti yang terlihat dalam Gambar 3 di bawah ini.



Gambar 3. Grafik Persepsi Dosen Terhadap Bentuk Rekognisi BKP MBKM di Program Studi

Program studi PWK melakukan evaluasi terhadap kurikulum dengan melibatkan peran dari para pemangku kepentingan, yaitu pengguna lulusan (industri), asosiasi profesi dan sekolah perencanaan, dan alumni. Keterlibatan

berbagai kepentingan dalam membangun kurikulum dapat membantu pendidikan tinggi lebih inovatif dan menyesuaikan dengan kebutuhan masyarakat dan industri (Jugembayeva & Murzagaliyeva, 2021). Berdasarkan peran dan profil lulusan yang diharapkan oleh para pemangku kepentingan diperoleh jika integrasi teknologi, dalam hal ini sistem informasi spasial dalam keilmuan PWK perlu diarusutamakan. Dari deksripsi tersebut, dapat mejadi arah perumusana capaian pembelajaran lulusan (CPL) atau Learning Outcomes yang akan diacu oleh prodi. Menurut SN Dikti (Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2020), CPL program studi perlu memasukkan aspek sikap, pengetahuan, keterampilan umum, dan ketrampilan khusus.

Teknologi yang tumbuh dengan pesat selama beberapa dua dekade terakhir, mewajibkan prodi untuk mengintegrasikannya dalam kurikulum. Keilmuan Perencanaan Wilayah dan Kota menurut Sclar (2007) selalu beradaptasi dengan perkembangan manusia dan ruang yang ada pada suatu masa. Pada abad 21, dengan tantangan perkotaan yang kompleks dan semakin beragamnya kehidupan penduduk, maka perlu kompetensi baru yang perlu merespon hal tersebut (Sclar, 2007). Penggunaan *sistem informasi* untuk mengolah data- data spasial dan digunakan untuk merumuskan perencanaan baik di tingkat kota atau wilayah, merupakan hal utama yang harus dimiliki oleh mahasiswa dan para lulusan. Karena, bidang perencanaan wilayah dan kota saat ini, juga harus mengintegrasikan pengolah data yang factual dan multiaspek, paka kemampuan untuk mengolah *spatial big data* sangat penting. Sesuai dengan nilai yang pada SDGs nomor 11, terkait Pembangunan dan Permukiman yang berkelanjutan (UNDP, 2015), maka teknologi ini harus dapat digunakan untuk mewujudkan kesejahteraan bagi warga kota dan

meningkatkan daya dukung lingkungan perkotaan secara berkesinambungan. Sehingga, penguatan teknologi dan sistem informasi spasial merupakan penciri utama lulusan yang dirumuskan dalam kurikulum program studi.

Deskripsi secara rinci mengenai pelaksanaan MBKM dan metode rekognisi bentuk kegiatan telah dirumuskan dalam dokumen pendukung implementasi MBKM program studi PWK dan kurikulum program studi yang telah mengakomodasi kebijakan belajar di luar kampus. Dokumen pendukung berupa pedoman akademik program studi TA 2021/2022 dan Pedoman Pertukaran Pelajar Magang Penelitian KKNT/Membangun Desa MBKM. Buku-buku pedoman ini telah disusun mulai Juli 2021 dan dapat dipergunakan sejak November 2021. Ketersediaan dokumen pendukung ini telah disosialisasi kepada dosen- dosen program studi, sehingga terdapat persamaan pemahaman. Bahwa seluruh dosens (100%) menyatakan jikan dokumen terkait MBKM telah terbit dan disahkan.

Informasi Program MBKM

Diseminasi program MBKM berperan penting, untuk membangun pengetahuan sivitas akademik terhadap kesempatan belajar selama (maksimal) 3 semester bagi mahasiswa. Selain itu juga meningkatkan

kualitas pendidikan tinggi yang lebih adaptif dengan kebutuhan masa depan. Upaya penyebarluasan informasi juga perlu dilakukan oleh seluruh pihak yang berkepentingan yaitu pemerintah dan perguruan tinggi, melalui berbagai media informasi. Menurut hasil suvei dari studi ini diperoleh bahwa 90% responden memperoleh informasi program melalui kegiatan sosialisasi yang dilakukan oleh Kemendikbudristek. Karena media sosial Kemendikbudristek cukup aktif dalam memberitakan terkait perkembangan MBKM dan melakukan sosialisasi yang dapat dilihat di kanal youtube. Dari data tersebut dapat diketahui jika, dosen sebagai salah satu motor dalam penyelenggaraan program, juga telah turut aktif dalam mengikuti sosialisasi yang diselenggarakan oleh Kemendikbudristek. Selain itu, perguruan tinggi (termasuk fakultas/program studi) juga telah memberikan sosialisasi terkait kegiatan MBKM yang sedang dan akan dilaksanakan. Meskipun demikian masih perlunya peningkatan sosialisasi dan penyebaran informasi terkait program ini agar lebih dapat emnjangkau selueurh mahasiswa dan perguruan tinggi di Indonesia. Para responden memberikan berbagai pendapat terkait pilihan, media informasi yang dapat digunakan untuk meningkatkan hal tersebut, seperti yang dapat dilihat pada Tabel 1 berikut.

Tabel 1
Preferensi Dosen Terhadap Jenis Media Informasi Sebagai Saran Sosialisasi Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka

Dimensi	Jenis	Persentase
Media informasi yang dapat meningkatkan pemahaman kebijakan MBKM	Kanal daring Kemendikbud (laman/website, media sosial).	6,7%
	Kanal daring Perguruan Tinggi (laman/website, media sosial).	33,3%
	Kegiatan sosialisasi luring/daring yang diselenggarakan oleh Kemendikbud.	33,3%
	Kegiatan sosialisasi luring/daring yang diselenggarakan oleh Perguruan Tinggi.	26,7%

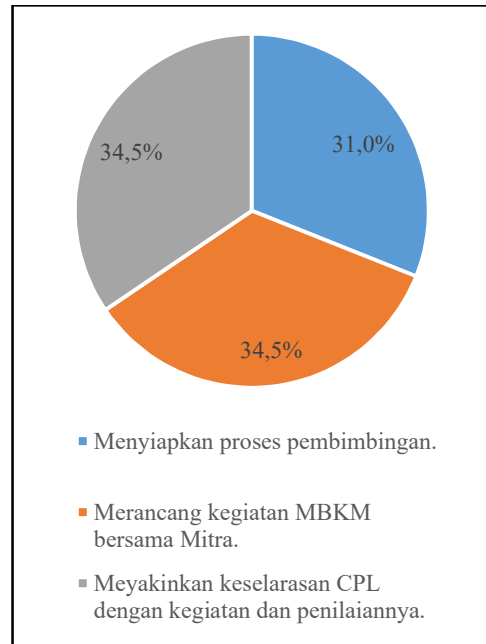
Berdasarkan tabel tersebut, responden memiliki preferensi yang bervariasi terhadap pilihan media informasi yang dapat digunakan untuk sosialisasi program. Kanal daring dari perguruan tinggi dan sosialisasi dari Kemendikbudristek memberikan persentase yang sama sebesar 33,3%. Hal ini dipahami karena, sosialisasi yang dilakukan oleh Kemendikbudristek baik secara daring maupun luring memberikan ruang bagi dosen untuk dapat menggali informasi lebih dalam dari pakar-pakar. Sedangkan, media sosial milik Kemendikbudristek menjadi pilihan yang paling sedikit oleh responden (6,7%) karena saat ini upaya tersebut sudah berjalan dengan sangat baik.

Kontribusi Dalam Penyelenggaraan MBKM

Penyelenggaraan program yang inovatif, seperti MBKM perlu didukung oleh seluruh bagian dalam perguruan tinggi. Dosen sebagai penggerak juga berkontribusi untuk mendorong pengembangan kompetensi mahasiswa, salah satunya melalui program MBKM ini. Keterlibatan dosen dalam program selain sebagai tim pengembang kebijakan MBKM juga dapat menjadi dosen pembimbing untuk tiap bentuk kegiatan. Di program studi PWK, 90 % dosen menyatakan kesediaan untuk menjadi dosen pembimbing kegiatan. Selain itu, responden juga menyatakan untuk dapat ikut berperan dalam penyelenggaraan program agar berjalan optimal seperti yang tertera pada Gambar 4.

Pada Gambar 4 tersebut, diketahui jika seluruh responden memiliki preferensi yang bermacam-macam terkait bentuk kontribusi yang dapat diberikan untuk pelaksanaan program agar lebih baik. Berkisar pada jumlah 30%, seluruh responden bersedia untuk membantu dalam proses pembimbingan, penyetaraan CPL dengan kegiatan MBKM dan dalam

proses penguatan dan penyusunan kegiatan MBKM bersama mitra. Salah satu tujuan program MBKM adalah meningkatkan bentuk kemitraan antara perguruan tinggi dengan industri, untuk menjembatani kesenjangan yang ada saat ini (Vaaland & Ishengoma, 2016).



Gambar 4

Grafik Preferensi Dosen Terhadap Kontribusi yang Dapat Diberikan untuk Mendukung Penyelenggaraan Program MBKM

Dampak MBKM untuk Pendidikan Tinggi

Program MBKM merupakan terobosan dalam upaya meningkatkan kualitas pendidikan tinggi, termasuk didalamnya institusi, dosen dan mahasiswa. Melalui program ini, institusi pendidikan diwajibkan untuk bertransformasi menjadi wadah yang lebih terbuka dan adaptif dengan perubahan agar lulusan yang dihasilkan dapat sesuai dengan kebutuhan zaman. Hal ini merupakan tantangan besar karena, pendidikan tinggi juga perlu berperan dalam memastikan bahwa lulusan ini dapat cepat beradaptasi dalam

dunia kerja (OECD, 2019). Hasil dari studi ini menggambarkan bahwa akademisi di program studi PWK mendukung penyelenggaraan MBKM karena memberikan peningkatan kompetensi mahasiswa, melalui pengalaman belajar yang inovatif di lapangan. Aspek ini menjadi salah satu kunci bawah bentuk kegiatan MBKM dapat membantu mahasiswa dan perguruan tinggi dalam menyiapkan lulusan yang selaras dengan industri saat ini - IKU 1 perguruan tinggi. Data menunjukkan bahwa sebanyak 90% dosen menyatakan jika, melalui program MBKM dapat meningkatkan proses belajar mahasiswa dengan baik. Termasuk didalamnya peningkatan keterampilan yang menyeluruh.

Melalui kegiatan MBKM, model pembelajaran *case based learning* (CBL) ataupun *project based learning* (PBL) menjadi salah satu inti kegiatan dalam pertukaran pelajar dan kegiatan di luar PT (industri). Model PBL merupakan salah satu metode utama, untuk memberikan pemahaman kepada mahasiswa dan menghubungkan antara teori dengan kehidupan/pengalaman di lapangan. Berbagai studi telah menerangkan manfaat dari PBL antara lain mendorong kreativitas, inovasi dan adaptif (Barak & Yuan, 2021). Pada aspek ini, program MBKM juga secara tidak langsung mendorong dosen untuk lebih inovatif dalam merancang suatu kegiatan pembelajaran. Sehingga, kapasitas dosen juga akan meningkat dengan adanya program MBKM ini. Hal ini selaras dengan pernyataan para dosen prodi PWK, bahwa melalui program ini mengembangkan kapasitas dosen dengan baik (90%).

Berbagai pembaharuan dilakukan oleh program studi PWK untuk mendukung program MBKM dan menjamin kesempatan mahasiswa untuk berkontribusi dalam program ini. Penyiapan kurikulum termasuk

didalamnya adalah rumusan capaian pembelajaran lulusan (CPL), disusun dengan melibatkan dengan para mitra (industry/pengguna lulusan, pemerintah dan alumni) dan akademisi/dosen di program studi. Pelibatan seluruh pemangku kepentingan ini, sebagai upaya untuk mengakomodasi kebutuhan masa kini pada pembelajaran di pendidikan tinggi. Hubungan antara pemerintah, universitas dan industri sebagai suatu triple-helix untuk mendukung inovasi dan pengetahuan. Pada saat ini, peran universitas sebagai pemeran utama dalam penciptaan pengetahuan/keilmuan, perlu merubah dari pendekatan tradisional ke institusi yang berorientasi inovasi dan pengetahuan (Desai, 2017). Program studi PWK telah bekerja sama dengan 8 (delapan) mitra, baik industri dan pergrutinggi, untuk mendukung terselenggaranya kegiatan MBKM. Para dosen di program studi, turut aktif dalam proses kerja sama ini melalui diskusi-diskusi dan karakteristik mitra yang dibutuhkan oleh program studi untuk mencapai CPL. Demikian juga dengan, persepsi dari mayoritas dosen (90%) bahwa setiap kegiatan MBKM sangat bermanfaat dalam upaya pencapaian CPL program studi.

Kesimpulan

Kebijakan terkait program MBKM telah terinformasi dengan baik kepada dosen- dosen program studi PWK yang turut serta dalam penelitian ini yaitu 90% dosen dari dosen program studi. Para dosen telah memperoleh diseminasi program melalui media informasi yang disediakan oleh Kemdikbudristek dan perguruan tinggi.

Program studi juga telah menyediakan kebijakan dalam bentuk pedoman kegiatan MBKM dan kurikulum sebagai fasilitas pelaksanaan MBKM. Pada dokumen tersebut telah dijelaskan persyaratan peserta dan mekanisme konversi sebesar

10-20 sks untuk setiap kegiatan MBKM, sesuai pernyataan seluruh dosen prodi.

Dosen prodi PWK, yang diwakili oleh 90% responden, bersedia untuk berkontribusi dalam pelaksanaan program. Bentuk berkomitmen bervariasi, dalam hal ini sebagai dosen pembimbing, penguatan kemitraan dan proses rekognisi kegiatan.

Dari hasil penelitian ini, bahwa penyelenggaraan MBKM telah dapat melibatkan seluruh bagian perguruan tinggi, industri dan pemerintah untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Namun demikian, program ini juga masih menemui berbagai hambatan seperti yang dinyatakan oleh responden penelitian ini, sebesar 43,5% menganggap bahwa regulasi program MBKM masih menjadi tantangan. Kesulitan rekognisi dan ketidak-selarasan regulasi secara vertikal juga menjadi salah satu penyebabnya. Hambatan kedua yang dinyatakan oleh responden (34,8%) yaitu terkait peninjauan dengan mitra, yang masih perlu dilakukan lebih optimal. Karena ditemui jika beberapa mitra, masih perlu memahami model MBKM ini dan perlu menyediakan SDM untuk mengelolan program ini di perusahaan. Dengan adanya hambatan tersebut, maka sebanyak 70% responden merekomendasikan untuk peningkatan fasilitas ini dengan memantapkan peraturan yang memayungi pelaksanaan program Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Karena, regulasi MBKM saat ini masih berkembang sesuai dengan situasi yang terjadi di lapangan. Penyediaan sistem informasi yang baik dan adaptif di perguruan tinggi dan kebijakan yang lebih jelas terkait rekognisi terhadap dosen-dosen yang telah berkontribusi dalam penyelenggaraan program.

Ucapan Terimakasih

Atas publikasi ini penulis mengucapkan Terima Kasih kepada Ditjen Dikti Ristek atas bantuan pendanaan program penelitian Kebijakan Merdeka

Belajar Kampus Merdeka dan Pengabdian Kepada Masyarakat Berbasis Hasil Penelitian dan Purwarupa PTS Tahun Anggaran 2021.

Daftar Pustaka

- Barak, M., & Yuan, S. (2021). A cultural perspective to project-based learning and the cultivation of innovative thinking. *Thinking Skills and Creativity*, 39(September 2020), 100766.
<https://doi.org/10.1016/j.tsc.2020.100766>
- Desai, N. S. (2017). Roles and Challenges of Universities in a Triple Helix Model. *National Conference on Trending Research in Management*, (March).
- Jugembayeva, B., & Murzagaliyeva, A. (2021). Creative thinking as a driver for students' transition to university 4.0 model. *Thinking Skills and Creativity*, 41(June), 100919.
<https://doi.org/10.1016/j.tsc.2021.100919>
- Junaidi, A. et al. (2020). *Panduan Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi Di Era Industri 4.0 Untuk Mendukung Merdeka Belajar-Kampus Merdeka*. Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Edisi IV Catatan.
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan; Mohammad Tohir. (n.d.). *Buku Panduan Merdeka Belajar - Kampus Merdeka*.
<https://doi.org/10.31219/osf.io/ujmte>
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. (2020). Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 03 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Perguruan Tinggi.
- OECD. (2019). *Education at a Glance 2019 : OECD Indicators*. Paris: OECD Publishing.
<https://doi.org/10.1787/f8d7880d-en>
- Ornstein, A. C., & Hunkins, F. P. (2018).

- Curriculum: Foundations, Principles ad Issues. Pearson Education Limited.*
- Sclar, E. (2007). *Urban Professionals in the 21st Century: Challenges for Pedagogy and Professional Practice.*
- UNDP. (2015). *Sustainable Development Goals.*
- Vaaland, T. I., & Ishengoma, E. (2016). University-industry linkages in developing countries: perceived effect on innovation. *Education and Training*, 58(9), 1014–1040. <https://doi.org/10.1108/ET-07-2015-0067>
- Vodenko, K. V., Ivanchenko, O. S., Tereshchenko, E. V., Petrova, N. F., & Mishchenko, V. A. (2019). Mechanisms of institutional regulation of government policy building in the higher education system in the conditions of Industry 4.0. *On the Horizon*, 27(3–4), 230–238. <https://doi.org/10.1108/OTH-07-2019-0036>
- World Economic Forum. (2015). *New Vision for Education Unlocking the Potential of Technology. World Economic Forum.*